

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang hidup demokratis, pendidikan politik sangat diperlukan karena kemanapun untuk berpartisipasi dalam masyarakat yang demokratis, kritis dan bertindak secara sadar dalam dunia yang plural. Pendidikan politik bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan masyarakat, baik terhadap pengetahuan maupun hak-hak hidupnya sehingga mereka menjadi manusia pembangunan yang sadar politik dan bertanggung jawab.

Berbicara masalah kesadaran politik, kesadaran bermula dari pengenalan, pengetahuan dan pengertian akan suatu hal dengan baik, atau dengan kata lain telah memiliki pengetahuan tentang sesuatu hal. Pada saat ini masyarakat mengenal, mengetahui dan mengerti tentang sesuatu hal (ilmu pengetahuan) lebih didominasi oleh pendidikan formal. Oleh karena itu dibutuhkan peranan pihak-pihak informal dalam membangun kesadaran politik masyarakat. Di sini, fungsi partai politik sangat efektif dalam membina kesadaran politik masyarakat melalui sosialisasi politik (pendidikan politik).

Masalah kesadaran politik sebenarnya merupakan tanggung jawab pemerintah dalam rangkaian proses pendidikan politik, karena pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pendidikan nasional dan mengupayakan keberhasilan pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk pendidikan

politik, sasarannya adalah terbina kesadaran politik masyarakat. Karena kesadaran politik masyarakat merupakan satu kebutuhan yang fundamental dalam menunjang keberhasilan pembangunan nasional. Dengan kesadaran politik yang tinggi, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional.

Meskipun demikian, kesadaran politik masyarakat tidak akan terlepas dari fungsi partai politik melalui sistem pendidikan dan pengajaran dari sebagian kecil partai politik yang ada di Indonesia. Dengan kata lain, fungsi partai politik dalam sosialisasi (pendidikan politik) baru dilakukan oleh sebagian kecil partai politik di Indonesia.

Upaya yang dilakukan oleh partai politik dalam melaksanakan fungsinya sebagai agen sosialisasi (pendidikan politik) agar terbangun kesadaran politik masyarakat memerlukan suatu mekanisme yang lebih provokatif sehingga membuat masyarakat menjadi terdorong untuk belajar lebih baik lagi dan bersikap aktif. Dengan demikian masyarakat akan mengetahui, mengenal dan memahami politik. Berdasarkan proses seperti itulah, proses sosialisasi (pendidikan politik) terhadap masyarakat dapat menghasilkan suatu kondisi yang membangkitkan motivasi dan meningkatkan pemahaman masyarakat dalam politik sehingga dapat pula membangkitkan kesadaran politik masyarakat.

Dalam Pemilu 2004 sebagian kalangan menyebut Pemilu tersebut dengan optimis bagi proses demokratisasi bangsa ini. Karena untuk pertama kalinya, setelah orde baru pemilih dapat memilih partai politik dengan melihat

para calon legislatif mereka. Untuk pertama kalinya pula terdapat Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang akan mewakili kepentingan daerah mereka masing-masing dalam pengambilan keputusan tertinggi di Republik ini. Dan untuk pertama kalinya pula, rakyat Indonesia dapat memilih secara langsung Presiden dan Wakil Presiden mereka.¹

Dalam pemilu legislatif 2004 kabupaten sleman provinsi DIY, Data Pemilih Tetap (DPT) yang terdaftar sebanyak 730.645, yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 504.048 orang, dengan tingkat partisipasi 81%. Pada pemilu legislatif 2009 kabupaten sleman provinsi DIY, Data Pemilih Tetap (DPT) yang terdaftar sebanyak 784.182 yang menggunakan pilihnya sebanyak 569.995 orang, dengan tingkat partisipasi 73%.

Perolehan suara Pemilu legislatif tahun 2004 Kabupaten Sleman, PDIP 107.909 suara, 19%. PAN 100.526 suara, 18%. PKB, 88.144 suara, 15%. PKS 46.281 suara, 8,3%. GOLKAR 45.442 suara, 8,1%. PPP 44,077 suara, 7,9%. PD 29.647 suara 5,3%. PKPB 18.338 suara, 3,3%. PDS 11.494 suara 2%. Sementara perolehan suara Pemilu legislatif tahun 2009 kabupaten sleman, PDIP 96.297 suara, 18%. PD 66.901 suara, 12%. PKS 54.261 suara, 10,3%. PAN 52.837 suara, 10,1%. GOLKAR 52.079 suara, 9,9%. PKB 41.565 suara, 7,9%. PPP 30.100 suara, 5,7%. HANURA 23.414 suara, 4,4%. GERINDRA 20.136 suara, 3,8%.²

Dilihat dari rata-rata perbandingan persentasi pemilih antara Pemilu legislatif pada tahun 2004, dengan persentasi pemilih pemilu legislatif tahun

¹ <http://eprints.uny.co.id/> diakses tanggal 25 maret 2012 (pendidikan politik masyarakat)

² <http://kpud-diyprov.go.id/> diakses tanggal 4 maret 2013 (arsip Kpud Yogyakarta)

2009, tingkat partisipasi pemilih relatif mengalami penurunan. Jika hal itu terulang lagi, maka akan banyak menghilangkan aspirasi politik masyarakat dan juga akan menghilangkan kualitas proses dan hasil Pemilu. Akibat tersebut akan terus berangkai dan dipertanyakannya fungsi lembaga-lembaga politik termasuk partai politik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka diperlukan penyadaran politik bagi masyarakat.

Adapun partai yang dipilih dalam penelitian ini adalah Partai Keadilan Sejahtera, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sleman provinsi DIY. Pemilihan Partai Keadilan Sejahtera DPD Sleman dengan alasan, bahwasannya Partai Keadilan Sejahtera DPD Sleman telah berusaha melaksanakan fungsinya untuk membangaun kesadaran politik masyarakat dilihat dari aktivitas-aktivitas kepartaian sebagai berikut, Ikut serta dalam pemilihan umum dan perolehan suara terus mengalami kenaikan. Menyelenggarakan pelatihan dibidang politik pengkaderan, organisasi, diskusi, lokakarya, seminar, pelayanan masyarakat, dan aktivitas lainnya.

Dari aktivitas-aktivitas tersebut, peneliti ingin melihat bagaimana efektifitas fungsi partai keadilan sejahtera dalam membangun kesadaran politik masyarakat.

B.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagai mana efektifitas fungsi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Daerah kabupaten Sleman dalam membangun kesadaran politik masyarakat 2004-2013?

C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengetahui sejauh mana efektifitas fungsi PKS dalam membangun kesadaran politik masyarakat.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Pemerintahan khususnya yang berhubungan dengan efektifitas fungsi partai politik dalam membangun kesadaran politik masyarakat.

b. Manfaat praktis

Memberikan saran dan masukan pada partai politik khususnya PKS dalam melaksanakan fungsinya sebagai agen sosialisasi politik dalam membangun kesadaran politik masyarakat.

D. Kerangka Dasar Teori

1. Partai Islam

Partai islam menurut Abdul Qadim Zallum adalah partai yang berdiri dari didasari atas akidah islam, yang mengadopsi berdasarkan hukum, dan solusi yang islami, yang metode perjuangannya adalah metode perjuangan Rasulullah SAW, Sementara Ziyat Ghazzal mendefinisikan

partai islam adalah sebuah organisasi permanen yang beranggotakan orang-orang islam yang bertujuan melakukan aktifitas politik sesuai dengan ketentuan syariat islam.³

Dari dua definisi diatas dapat diambil beberapa poin yang menjadi identitas pokok partai islam, *pertama*, partai islam wajib berasaskan Aqidah islam, dengan kata lain, ideologi partai harus ideologi islam. Maka partai yang dasarnya bukan Aqidah islam, bukanlah partai islam. *Kedua*, partai islam wajib mengadopsi fikrah (ide) thariqah (metode perjuangan) yang berasal dari islam. Fikrah dan thariqah ini utamanya terwujud dalam penentuan dan langkah-langkah (program) untuk mencapai tujuan. Maka bukan partai islam partai yang tujuannya untuk melayani ideologi barat. *ketiga*, partai islam wajib beranggotakan muslim, berarti ikatannya adalah ikatan ukhuwah islamiyah yang berpangkal pada kesamaan aqidah, yaitu aqidah islamiyah.

2. Efektivitas

Pemahaman setiap orang terhadap suatu istilah seringkali berbeda satu sama lain. Hal ini terlihat dalam pembatasan yang dikemukakan beberapa ahli tentang konsep efektivitas. Berikut ini akan penulis kemukakan terlebih dahulu tentang definisi efektivitas yang diungkapkan oleh beberapa ahli.

“The Liang Gie berpendapat bahwa effectiveness, efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek (akibat) yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan perbuatan dengan maksud tertentu yang dikehendakinya

³ <http://khilafah1924.org/> diakses tanggal 23 april 2013 (partai islam)

maka perbuatan itu dikatakan efektif kalau menimbulkan akibat atau mencapai maksud sebagaimana yang dikehendakinya. Dengan demikian pengertian efektifitas di sini bahwa bila suatu perubahan atau usaha dapat menimbulkan akibat atau tercapainya tujuan yang dikehendaki”⁴

Sementara itu Law Less lebih jauh memandang tentang efektifitas sebuah organisasi sebagai berikut:

“Secara umum, efektifitas organisasi didefinisikan dalam batas dari tingkat pencapaian tujuan maka jika kita berbicara tentang tingkat pencapaian tujuan maka hal itu mewujudkan derajat atau tingkat dari efektivitas. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka konsep efektivitas organisasi merupakan pencapaian tujuan organisasi, namun pada sisi lain lebih terlihat bahwa efektivitas organisasi tersebut merupakan suatu keberhasilan dengan mempertimbangkan sasaran dan mekanisme guna mencapai sasaran yang akan dicapai dalam hal ini mempertimbangkan sasaran dan mekanisme tersebut berarti pelaksanaan organisasi tersebut merupakan suatu kriteria penilaian tentang konsep efektifitas (faktor intern) di samping itu maka bisa terjadi dari lingkungan/faktor lingkungan (faktor ekstern) mengenai penilaian kriteria organisasi telah banyak dikemukakan”⁵ (Law Less, 1972: 328).

Koharudin mendefinisikan efektivitas sebagai “keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan” (Koharudin, 1994: 18).

Dari pengertian di atas, karena efektivitas tersebut cenderung berkaitan dengan suatu pekerjaan, maka SP. Siagian menjelaskan sebagai berikut:

“Efektivitas kerja berarti penyelesaian pekerjaan tepat waktu yang ditetapkan, artinya apakah pelaksanaan suatu tugas yang dinilai baik atau tidak, itu sangat tergantung pada bilamana tugas itu

⁴ The Liang Gie, 1981 Efisiensi Kerja Bagi Pembangunan Negara, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm 50.

⁵ <http://2.frameit.blogspot.com/> diakses tanggal 12 April 2012 (efektivitas organisasi)

diselesaikan atau tidak terutama menjawab pertanyaan bagaimana melaksanakannya dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk hal tersebut”⁶

Sehingga pada gilirannya kata efektifitas lebih menekankan pada hasil yang dicapai, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Syamsi bahwa :

“Kata efektifitas kini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang berarti berhasil guna. Setiap instansi pasti menghendaki agar kegiatan instansinya sukses dalam mencapai tujuan. Pengertian efektif ini tidak sama dengan efisien (berdaya guna), karena dalam pengertian efisien itu harus dipertimbangkan juga besarnya pengorbanan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sedangkan efektifitas yang ditentukan adalah segi keberhasilannya atau efektifnya saja”⁷

Sementra George Paulus, mengemukakan secara rinci berkaitan dengan efektifitas organisasi sebagai berikut :

1. Produktivitas organisasi
2. Fleksibiliti organisasi dalam bentuk keberhasilan diri dari perubahan-perubahan didalam organisasi, dan menyesuaikan diri dari perubahan luar organisasi.
3. Tidak adanya tekanan-tekanan, ketegangan-ketegangan dan konflik di antara bagian-bagian organisasi.

Produktifitas dimaksud untuk mengetahui perstasi dan hasil kerja yang dicapai organisasi itu, menurut (Gibson), Produktifitas adalah kemampuan organisasi untuk memperoleh jumlah dan mutu output yang sesuai dengan permintaan lingkungan, sehingga dari pendapat tersebut

⁶ <http://respository.unhas.ac.id> / diakses tanggal 12april 2012 (efektivitas organisasi)

⁷ <http://elib.unikom.ac.id> / diakses tanggal 12 april 2012 (efektivitas organisasi)

dapat disimpulkan bahwa produktifitas organisasi menyangkut dua hal, yaitu jumlah (kuantitas) dan mutu (kualitas) mengenai jumlah kuantitas dalam hubungan dengan hal ini adalah jumlah masyarakat yang dilayani organisasi (partai) dalam membina kesadaran politik masyarakat.

Sehubungan dengan hal ini (Snoodgrass)

“berpendapat bahwa produktifitas diukur banyaknya orang yang dicapai oleh pelayanan yang diberikan, indikatornya dari masyarakat yang memamfaatkan pelayanan tersebut, dan pemamfaatan program yang memberi perubahan individu dan lingkungannya. Secara efesiensi atau hasil yang dicapai dari pengeluaran sumberdaya rasional”⁸.

Berdasarkan pendapat tersebut maka urutan-urutan produktifitas yang dilakukan oleh (Snoodgrass) akan dipakai dalam penelitian ini, karna organisasi (partai) ditugaskan memberi pelayanan kepada masyarakat.

Fleksibiliti berhubungan dengan organisasi dalam menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi baik yang timbul dari dalam maupun yang datang dari luar organisasi. Dalam pelaksanaan tugasnya organisasi (partai) tidak bisa lepas terhadap lingkungannya. Seperti diketahui organisasi yang baik adalah organisasi yang bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berubah.

Dalam hal ini (Osbone dan Hunt);

“Menyatakan bahwa organisasi yang menyesuaikan diri dengan lingkungannya mempunyai pengaruh penting terhadap efektifitas”

⁸ <http://www.fe.onimal.org> / diakses 19 April 2012 (produktivitas organisasi)

Dari pendapat tersebut dapat dikatakan organisasi dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berpengaruh terhadap akan keberhasilan organisasi. Sedangkan ada tidaknya ketegangan, hambatan dan konflik dapat berpengaruh juga terhadap keberhasilan organisasi. Seperti yang dikemukakan (Indra Wijaya).

“Bahwa konflik dalam organisasi atau dalam hubungan antar – kelompok adalah sesuatu yang tidak dapat dihindarkan, akan tetapi konflik dalam batas tertentu justru sangat bermamfaat bagi penciptaan perilaku kerja yang efektif.”⁹

Kemudian, setelah penyusun mengutarakan beberapa pengertian efektifitas menurut beberapa ahli di atas, maka efektifitas di sini diaplikasikan pada kelembagaan organisasi (partai politik) dalam menyelenggarakan fungsi dan perannya sebagai agen sosialisasi politik dalam membangun kesadaran politik masyarakat. Selanjutnya, apabila ditarik kesimpulan, pengertian efektifitas adalah tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang dilaksanakan partai politik sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan yaitu membangun kesadaran politik dalam masyarakat.

3. Partai Politik Dalam Negara Demokrasi

a. Pengertian Partai Politik

Di dalam ilmu politik sudah sejak dulu mengajarkan bahwa partai politik mempunyai peranan yang sangat penting dalam

⁹ <http://www.eprin.uny.ac.id/> / diakses tanggal 19 April 2012 (kepemimpinan, konflik dan strategi organisasi)

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang menganut demokrasi, terutama sebagai penghubung antara kepemimpinan rakyat dengan pemerintah. Partai politik pada awalnya merupakan tuntutan dan keharusan mutlak dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Partai politik bisa eksis secara ideal dalam masyarakat ditunjukkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi massa, mewakili kepentingan umum, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang berbeda, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan secara absah dan damai.

Supaya memperoleh gambaran yang jelas mengenai partai politik, maka perlu kiranya diketahui dahulu mengenai pengertian partai politik itu sendiri. Tanpa mengetahui pengertiannya, maka sulit untuk memahami lebih lanjut mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan partai politik. Dengan adanya kesamaan pandangan mengenai pengertian partai politik, maka akan mempunyai sikap yang sama dalam melihat atau membahas, lebih lanjut mengenai partai politik.

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik pada hakekatnya merupakan suatu organisasi yang terdiri dari sekelompok orang yang mempunyai cita-cita, tujuan, dan orientasi-orientasi yang sama, dimana organisasi ini berusaha memperoleh dukungan dari rakyat dalam rangka usahanya memperoleh kekuasaan dan kemudian mengontrol atau mengendalikan jalannya roda pemerintahan yang kesemuanya itu pada gilirannya sebagai pangkal tolak organisasi

tersebut dalam usaha merealisasikan program-program yang telah dicanangkan oleh partai politik tersebut.

Sigmund Neumann dalam karangannya *Modern Political Parties* mengemukakan definisinya bahwa: partai politik adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda.¹⁰

George B. De Huznan dan Thomas H. Stevenson memberikan batasan partai politik sebagai kelompok orang-orang yang terorganisir untuk ikut serta mengendalikan suatu pemerintahan, agar dapat melaksanakan programnya dan menempatkan anggotanya dalam jabatan.¹¹

Sedangkan Frederick memberikan batasan partai politik sebagai kelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi pemimpin partainya. Sementara itu Soltau memberikan definisi partai politik sebagai kelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisasikan, yang bertindak sebagai salah satu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan

¹⁰ Miriam Budihardjo, 2002, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, hlm 14.

¹¹ Soelisyati Ismail Gani, 1987, *Pengantar Ilmu Politik*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 112.

untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan kebijakan umum yang mereka buat¹²

Sementara Lopa Lombarda dan Weiner memberikan batasan partai politik ialah organisasi yang mempunyai kegiatan yang berkesinambungan. Artinya, masa hidupnya tak tergantung pada masa jabatan atau masa hidup para pemimpinnya. Organisasi yang terbuka dan permanen tidak hanya di tingkat pusat, tetapi juga di tingkat lokal. Para pemimpin di tingkat pusat dan lokal berkehendak kuat untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan untuk membuat keputusan politik secara sendiri maupun berkoalisi dengan partai lain, dan melakukan kegiatan mencari dukungan dari para pemilu atau cara-cara lain untuk mendapatkan dukungan umum.¹³(Ramlan Surbakti, 1992: 116).

b. Tipologi Partai Politik

Partai politik dapat diklasifikasikan berdasarkan kriteria tertentu, seperti azas dan orientasi, komposisi dan fungsi anggota, basis sosial dan tujuan.

Dalam kriteria azas dan orientasi, partai politik terdapat tiga tipe (Miriam Budihardjo, 1993: 166). Adapun tiga tipe ini meliputi partai *Pertama*, politik doktriner, yaitu suatu partai politik yang memiliki sejumlah program dan kegiatan konkrit sebagai penjabaran ideologi. Ideologi yang dimaksud ialah seperangkat nilai politik yang

¹² Ramlan Surbakti, 1992, Memahami Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, hlm 116

¹³ Ibid, hal 116

dirumuskan secara konkrit dan sistematis dalam bentuk program-program kegiatan yang pelaksanaannya diawasi secara ketat oleh aparat partai. Pengertian kepemimpinan mengubah gaya kepemimpinan pada tingkat tertentu, tetapi tidak mengubah prinsip dan program partai karena ideologi partai sudah dirumuskan secara konkrit dan partai ini terorganisasi secara ketat.

Kedua, partai politik pragmatis, yaitu suatu partai politik yang mempunyai program dan kegiatan yang tak terikat kaku pada suatu doktrin dan ideologi tertentu. Artinya perubahan, waktu, situasi dan kepemimpinan akan mengubah program, kegiatan dan penampilan partai politik tersebut. Penampilan partai politik pragmatis cenderung merupakan cerminan dari program-program yang disusun oleh pemimpin utamanya dan gaya kepemimpinan sang pemimpin.

Ketiga, partai kepentingan, partai ini merupakan suatu partai politik yang dibentuk dan dikelola atas dasar kepentingan tertentu, seperti petani, buruh, etnis, agama atau lingkungan hidup yang secara langsung ingin berpartisipasi dalam pemerintahan.¹⁴

Partai politik menurut basis dukungannya ada dua yaitu partai massa dan partai kader. Partai massa biasanya mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggotanya. Kekuatan pada keunggulan jumlah anggotanya. Kekuatan pada keunggulan jumlah anggota dengan cara memobilisasi massa sebanyak-banyaknya dan

¹⁴ Miriam Budihardjo, 2002, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, hlm 116.

mengembangkan diri sebagai pelindung bagi berbagai kelompok dalam masyarakat sehingga pemilihan umum dapat dengan mudah dimenangkannya. Partai massa merupakan gabungan dari berbagai aliran politik yang sepakat untuk berada dalam lindungan partai guna memperjuangkan dan melaksanakan program-programnya yang umumnya bersifat umum. Kelemahan partai massa adalah tampak pada saat pembagian kursi atau jabatan dan pada saat perumusan kebijakan karena karakter dan kepentingan setiap kelompok aliran akan sangat menonjol. Ketidak mampuan partai dalam membuat keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak merupakan ancaman bagi keutuhan partai. Sebaliknya, partai kader tidak mempunyai anggota atau pendukung sebanyak partai massa, partai kader lebih mengandalkan kualitas anggota, kekuatan organisasi dan disiplin anggota sebagai sumber kekuatan utama. Seleksi keanggotaan dalam partai kader biasanya sangat ketat, yaitu melalui kaderisasi yang berjenjang dari intensif, penegasan disiplin partai yang konsisten dan tanpa pandang bulu.

Almond menggolongkan partai politik berdasarkan basis sosial dan tujuannya. Menurut basis sosialnya, partai politik dibagi menjadi empat tipe, yaitu: *pertama* partai politik yang beranggotakan lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat, seperti kelas atas, menengah, dan bawah. *Kedua*, partai politik yang anggotanya berasal dari kalangan kelompok kepentingan tertentu, seperti petani, buruh, dan pengusaha.

Ketiga, partai politik yang anggota-anggotanya berasal dari pemeluk agama tertentu, seperti Islam, Katholik, Hindu, Budha, Kristen.

Keempat, partai politik yang anggota-anggotanya berasal dan kelompok budaya, seperti suku bangsa, bahasa dan daerah tertentu.

Berdasarkan tujuannya, partai politik dibagi menjadi tiga, yaitu:

Pertama, partai politik pembinaan bangsa, artinya, partai politik yang bertujuan menciptakan kesatuan nasional dan biasanya menindas kepentingan-kepentingan sempit. *Kedua*, partai perwakilan kelompok, artinya partai yang menghimpun berbagai kelompok masyarakat untuk memenangkan sebanyak mungkin kursi dalam parlemen. *Ketiga*, partai mobilisasi, artinya partai yang berupaya memobilisasi masyarakat kearah pencapaian tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh pemimpin partai, sedangkan partisipasi dan perwakilan kelompok cenderung diabaikan. Partai ini cenderung bersifat monopolistis karena hanya ada satu partai dalam masyarakat.

Apabila mengamati partai politik dengan segala macam kegiatan yang dilaksanakannya, maka akan dapat menyimak fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh partai politik di negara yang satu sama dengan fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh partai politik di negara-negara yang lainnya.

Sehubungan dengan fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh partai politik, maka dinyatakan bahwa suatu partai politik yang baik salah satu syaratnya adalah bahwa partai politik tersebut harus mampu

melaksanakan fungsi-fungsi yang melekat pada dirinya dengan baik pula.

Pada umumnya dapat dinyatakan bahwa partai-partai politik yang terdapat di berbagai negara melaksanakan fungsi-fungsinya diantaranya adalah partai politik berfungsi sebagai sarana sosialisasi politik.

Gabriel Almond mengemukakan pendapatnya bahwa sosialisasi politik dapat membentuk dan mentransmisikan kebudayaan politik suatu bangsa dalam bentuk penyampaian kebudayaan itu dari generasi tua kepada generasi muda, serta dapat pula merubah kebudayaan politik.

Untuk mentransmisikan atau meneruskan kebudayaan politik dari suatu generasi kepada generasi berikutnya, diperlukan agen-agen atau sarana-sarana sosialisasi politik. Partai politik adalah merupakan salah satu agen atau sarana sosialisasi politik.

Melalui partai politik dapat menjadi kontak-kontak politik langsung di antara warga negara. Sebagai agen atau sarana sosialisasi politik, partai politik mempunyai kewajiban untuk mengajarkan ideologi partai dan norma-norma politik kepada para anggota atau pendukungnya dengan cara memberikan ceramah-ceramah, kursus-kursus maupun penataran-penataran tentang politik.¹⁵

¹⁵ Gabriel A. Almond, 1989, Politik dan Partisipasi Politik, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm 126 .

Dari beberapa batasan tentang pengertian partai politik yang dikemukakan beberapa pakar dan pengamat politik di atas, penyusun menyimpulkan pengertian partai politik merupakan organisasi artikulatorial yang terdiri atas pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada persoalan kekuasaan pemerintahan dan bersaing guna memperoleh dukungan rakyat untuk menempatkan kantung-kantung kekuasaan politik. Juga sebagai perantara utama yang menghubungkan kekuasaan dan ideologi-ideologi yang ada dalam masyarakat.

c. Fungsi Partai Politik

Fungsi adalah sekumpulan aktivitas operasi program yang dapat member hasil input atau output yang berupa nilai ataupun sebuah hasil operasi program. Dalam negara berkembang partai politik dapat membina kesatuan dan persatuan bangsa, persoalan-persoalan yang dihadapi oleh pemerintah dari negara-negara itu cukup kompleks, maka partai politik dituntut untuk berperan lebih aktif dalam melaksanakan fungsinya, yaitu :

1) Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik

Pembentukan sikap-sikap politik atau untuk membentuk sikap dan keyakinan politik dibutuhkan waktu yang panjang melalui proses yang berlangsung tanpa henti. Menurut Gabriel Almond, terdapat dua hal penting, yaitu: *pertama*, bahwa sosialisasi politik berjalan terus menerus selama hidup seseorang.

Sikap-sikap dan nilai-nilai yang didapatkan dan terbentuk pada masa kanak-kanak akan selalu disesuaikan atau akan diperkuat sementara ia mengalami berbagai pengalaman sosial. Pendidikan sekolah, pengalaman keluarga dan pengaruh pergaulan berperan dalam memperkuat keyakinan tetapi dapat pula mengubahnya secara drastis. *Kedua*, sosialisasi politik dapat berwujud transmisi dan pengajaran. Artinya dalam sosialisasi itu terjadi interaksi antara suatu sikap dan keyakinan politik yang dimiliki oleh generasi tua terhadap generasi muda yang cenderung masih fleksibel menerima pengaruh ajaran. Transmisi dan pengajaran tersebut dapat berwujud: *Pertama*, interaksi langsung yaitu pengajaran formal ataupun doktrinasi suatu ideologi. *Kedua*, interaksi tak langsung yang sangat erat pengaruhnya pada masa kanak-kanak, dimana berkembang sifat penurut atau sikap pembangkangan terhadap orang tua, guru atau teman yang mempengaruhi sikapnya di masa dewasa terhadap pemimpin politiknya dan terhadap sesama warga negara.

2) Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik

Rekrutmen politik adalah proses seleksi atau rekrutmen anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatan administratif maupun politik. Setiap sistem politik memiliki sistem atau prosedur-prosedur rekrutmen yang berbeda. Anggota kelompok yang direkrut/diseleksi adalah yang memiliki

suatu kemampuan atau bakat yang sangat dibutuhkan untuk suatu jabatan atau fungsi politik.

Setiap partai politik memiliki pola rekrutmen yang berbeda. Pola rekrutmen anggota partai politik disesuaikan dengan sistem politik yang dianutnya. Di Indonesia, perekrutan politik berlangsung melalui Pemilu setelah setiap calon peserta yang diusulkan oleh partainya diseleksi secara ketat oleh suatu badan resmi. Seleksi ini dimulai dari seleksi administratif, penelitian khusus (litsus) yaitu yang menyangkut kesetiaan pada ideologi negara.

3) Partai politik sebagai sarana komunikasi politik

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai sarana komunikasi politik, partai politik bertindak sebagai penghubung antara dua pihak, partai politik menyalurkan informasi dari pihak yang satu kepada pihak yang lain secara timbal balik. Arus informasi di suatu negara bersiat dua arah, artinya informasi tersebut arusnya berjalan dari atas ke bawah dan sebaliknya.¹⁶

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa partai politik dapat bertindak sebagai penghubung yang menampung arus informasi, baik informasi yang berasal dari pihak yang berkausa untuk disalurkan kepada pihak masyarakat atau sebaliknya. Dalam hal ini partai politik tidak menyampaikan begitu saja segala

¹⁶ Miriam Budihardjo, 2002, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, hlm 163

informasi dari pemerintah kepada masyarakat atau dari masyarakat kepada pemerintah, tetapi merumuskan terlebih dahulu sehingga komunikasi dapat dengan mudah memahami dan menerimanya.

4) Partai politik sebagai sarana artikulasi dan agregasi kepentingan

Sebagaimana sudah disinggung di atas bahwa salah satu fungsi partai politik adalah sarana komunikasi politik, maka sudah menjadi semacam kewajiban bagi partai politik untuk mengatur sedemikian rupa sehingga berbagai beragam pendapat, aspirasi, maupun kepentingan yang ada dalam masyarakat tersebut dapat tersalurkan semuanya, kesemuanya itu bisa berwujud dukungan ataupun tuntutan-tuntutan.

Proses untuk merumuskan dan kemudian menyalurkan berbagai macam pendapat, aspirasi dan kepentingan yang ada di dalam masyarakat kepada pihak penguasa yang dinamakan *artikulasi kepentingan*¹⁷ Demikian pula apabila terdapat tuntutan-tuntutan yang ada di dalam masyarakat yang sedikit banyak mempunyai persamaan ataupun menyangkut masalah-masalah yang sama, maka hal demikian digabung menjadi satu. Proses penggabungan tuntutan-tuntutan dan dukungan-dukungan yang ada di dalam masyarakat disebut agregasi kepentingan (*interest aggregation*). Dengan terdapatnya artikulasi dan agregasi kepentingan yang relatif banyak, maka partai politik dapat

¹⁷ Miriam Budihardjo, 2002, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, hlm 43

diartikan ikut membina kelangsungan kehidupan demokrasinya yang telah ada di negara-negara yang menganutnya.

Di dalam suatu sistem politik, artikulasi dan agregasi kepentingan yang dilaksanakan oleh partai politik pada hakekatnya merupakan input atau masukan yang kemudian disalurkan atau disampaikan kepada badan-badan yang mempunyai wewenang yaitu legislatif dan eksekutif. Badan ini mengolah setiap input yang masuk dijadikan output, yaitu kebijakan-kebijakan yang mempunyai kekuatan mengikat segenap warga negara. Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan badan yang berwenang itu dapat berbentuk seperti Undang-undang. Peraturan pemerintah maupun kebijaksanaan-kebijaksanaan umum lainnya.

5) Partai politik sebagai sarana pengatur konflik

Konflik yang dimaksud adalah dalam arti luas, mulai dari perbedaan pendapat sampai pada pertikaian fisik antar individu atau kelompok dalam masyarakat. Dalam negara demokrasi, setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya sehingga konflik merupakan gejala yang sulit dielakkan.

Akan tetapi, suatu sistem politik hanya akan mentolerir konflik yang tidak menghancurkan dirinya sehingga permasalahannya bukan menghilangkan konflik itu, melainkan

mengendalikan konflik melalui lembaga demokrasi untuk mendapatkan penyelesaian dalam bentuk keputusan politik.

Partai politik sebagai suatu lembaga demokrasi berfungsi untuk mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak yang berkonflik, menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan yang berkonflik dan membawa permasalahan ke dalam musyawarah badan perwakilan rakyat untuk penyelesaian berupa keputusan politik. Untuk mencapai penyelesaian itu diperlukan kesediaan berkompromi di antara para wakil rakyat yang berasal dari partai-partai politik yang berbeda. Apabila partai-partai politik keberatan mengadakan kompromi maka partai politik bukannya mengendalikan konflik, melainkan menciptakan konflik dalam masyarakat.¹⁸

6) Partai politik sebagai sarana partisipasi politik

Partisipasi politik adalah kegiatan setiap warga negara dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan kepemimpinan pemerintahan. Kegiatan yang dimaksud antara lain mengajukan tuntutan membayar pajak, melaksanakan keputusan, mengajukan kritik dan koreksi atas keputusan dan pelaksanaan suatu kebijakan umum, dan mendukung atau menentang calon pemimpin tertentu, mengajukan alternatif pemimpin dan memilih wakil rakyat dalam Pemilu. Partai

¹⁸ Miriam Budihardjo, 2002, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, hlm 164.

politik mempunyai fungsi untuk membuka kesempatan, mendorong dan mengajak para anggota masyarakat untuk menggunakan partai politik sebagai saluran mempengaruhi kegiatan proses politik. Jadi, partai politik merupakan wadah partisipasi politik. Fungsi ini lebih tinggi posisinya dalam sistem politik totaliter, karena dalam sistem politik ini lebih mengharapkan ketaatan daripada aktivitas mandiri.

7) Partai politik sebagai sarana mengkritisi rezim yang berkuasa

Pada umumnya berlangsung di negara yang menganut paham demokrasi, karena negara-negara yang menganut paham demokrasi kebebasan untuk mengemukakan pendapat warga negara termasuk di dalamnya menyampaikan kritik kepada rezim yang berkuasa, diperbolehkan.

Fungsi partai politik sebagai sarana untuk mengkritisi rezim yang berkuasa sebenarnya mempunyai kaitan erat dengan fungsi partai politik sebagai sarana pembuatan kebijakan.

Pada umumnya partai politik yang melaksanakan fungsi sebagai sarana untuk mengkritik rezim yang berkuasa adalah merupakan partai politik minoritas, dengan sendirinya sangat kecil kemungkinannya untuk dapat memegang tampuk pemerintahan dan menduduki badan perwakilan rakyat secara mayoritas. Disebabkan karena partai politik tersebut sering mengalami kekalahan daripada memenangkan persaingan dengan partai politik

yang lainnya dalam rangka merebut atau mendapatkan sebanyak mungkin dukungan dari warga negara.

Pada hakekatnya berbagai macam kritik yang dilancarkan oleh partai minoritas atau partai oposisi dimaksudkan untuk mengontrol jalannya roda pemerintahan yang dikendalikan oleh rezim yang sedang berkuasa untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan roda pemerintahan dan tidak bertindak sewenang-wenang juga cenderung menyalahgunakan kekuasaan yang ada pada dirinya.

8) Partai politik sebagai sarana pembuatan kebijakan

Fungsi partai politik sebagai sarana pembuatan kebijakan dapat dilaksanakan apabila partai politik yang bersangkutan merupakan partai yang memegang tampuk pemerintahan dan menduduki badan perwakilan rakyat secara mayoritas. Apabila partai politik yang bersangkutan tidak memegang tampuk pemerintahan dan tidak menduduki badan perwakilan rakyat secara mayoritas, akan tetapi hanya berkedudukan sebagai partai yang melakukan oposisi, maka partai politik tersebut tidak merupakan yang menjalankan fungsinya sebagai sarana untuk mengkritik kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Sebagaimana dalam negara yang menganut paham komunis, karena hanya partai komunis satu-satunya partai politik di negara tersebut, maka partai itu yang memegang kendali dan mendominasi

pemerintahan, karena itu pula dapat dinyatakan bahwa partai komunis itu merupakan partai yang melaksanakan fungsi pembuatan kebijakan.¹⁹

Namun demikian tugas partai-partai demokratis tersebut tidak selalu dapat ditemukan di dalam negara-negara yang masih baru atau yang tidak demokratis. Memang, partai politik juga memainkan fungsi-fungsi di atas, tetapi biasanya tidak berjalan secara kompetitif dan semuanya di bawah kontrol negara. Di negara-negara baru misalnya, kebangkitan dan aktivitas partai kerap kali berkaitan dengan proses pembentukan identitas nasional, pengabsahan lembaga-lembaga pemerintahan, serta usaha-usaha untuk memperkuat persatuan nasional. Dalam kaitan ini, partai politik kerap kali tak berfungsi sebagai penyedia akses bagi penyalur tuntutan yang absah pada penguasa tetapi semata-mata sebagai elemen dalam strategi persatuan nasional dan pengontrol perbedaan pendapat.

Sebaliknya partai-partai politik di dalam negara yang non demokratis biasanya memainkan fungsi utamanya sebagai alat untuk memobilisasi massa mencari legitimasi di mata rakyatnya untuk mendukung sistem politik dalam melestarikan status quo dan sebagainya. Dalam batas-batas tertentu partai-partai demokrat tidak berjalan secara kompetitif. Di dalam sistem multi partai, fungsi-

¹⁹ <http://www.academia.edu> / diakses tanggal 3 maret 2012 (partai politik, system pemerintahan dan Oposisi politi

fungsi tersebut lebih banyak didominasi oleh partai, fungsi-fungsi tersebut lebih banyak didominasi oleh partai negara, sementara partai-partai lain hanya sebagai penonton, kurang memainkan peran layaknya partai politik.

Kondisi di dalam negara yang menganut sistem partai seperti negara-negara komunis jauh lebih parah lagi, di negara-negara komunis peran partai sangat sentral sehingga wacana tentang partai politik terasa lebih penting ketimbang diskusi tentang negara. Dalam kenyataannya keterkaitan negara dalam partai politik begitu dekat. Partai komunis dalam banyak hal memborong hampir semua fungsi dalam sistem politik baik input maupun output. Akibatnya partai adalah penjaga kelangsungan sistem dan pada saat yang lain muncul sebagai negara itu sendiri.

Dengan demikian peran dan fungsi partai politik sangat mulia bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Meskipun partai-partai politik itu mempunyai kepentingan sendiri-sendiri tetapi keberadaan dan kebesaran mereka sangat membutuhkan dukungan masyarakat. Sebagai penyalur suara rakyat, partai politik akan memainkan peran membentuk wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR dan pemerintahan. Melalui partai politik setiap warga negara berhak menyalurkan aspirasinya dan berhak mengikuti seleksi menduduki jabatan-jabatan politik. Seseorang yang berhasil menduduki jabatan politik sangat

ditentukan secara langsung oleh dukungan rakyat melalui Pemilu. Setiap warga negara juga berhak mengkritik, mengawasi atau menagih janji-janji partai politik bila kelak mereka berkuasa.

d. Kategori Partai Politik

Sehubungan dengan pembahasan tentang aktualisasi partai politik maka dipandang perlu untuk menjelaskan secara lebih jauh tentang jenis-jenis partai politik yang ada di Indonesia serta bagaimana pengaruhnya terhadap efektivitas fungsi yang telah dijalankannya. Diharapkan nantinya dengan melihat jenis-jenis partai politik ini kita dapat mengidentifikasi kecenderungan kinerja yang nantinya akan ditampilkan oleh masing-masing partai politik yang ada di Indonesia.

1. Partai Proto

Partai proto adalah tipe awal partai politik sebelum mencapai tingkat perkembangan seperti dewasa ini yang muncul di Eropa Barat sekitar abad tengah sampai abad ke-19. Ciri paling menonjol dari partai proto adalah perbedaan antara kelompok anggota (ins) dengan non-anggota (outs). Masih belum nampak sebagai partai politik modern, tetapi hanya merupakan faksi-faksi yang dibentuk berdasarkan pengelompokan ideologi dalam masyarakat.

2. Partai Kader

Merupakan perkembangan lebih lanjut dari partai proto, muncul sebelum diterapkan hak pilih secara luas bagi rakyat, sehingga sangat tergantung masyarakat kelas menengah ke atas

yang memiliki hak pilih, keanggotaan yang terbatas, kepemimpinan, serta pemberi dana. Tingkat organisasi dan ideologi masih rendah. Ideologi yang dianut konservatisme ekstrim atau reformasi moderat, partai kader tak perlu organisasi besar yang memobilisasi massa. Contoh: PSI di Indonesia (1950 – 1960).

3. Partai Massa

Muncul setelah terjadi perluasan hak pilih rakyat, sehingga dianggap sebagai suatu respon politik dan organisasional bagi perluasan hak pilih. Partai massa terbentuk di luar parlemen (extra-parlemen) dengan basis massa yang luas, seperti buruh, tani, kelompok agama, dan lain-lain, dengan ideologi yang kuat untuk memobilisasi massa dengan organisasi yang rapi. Tujuan utamanya bukan hanya memperoleh kemenangan dalam pemilihan umum, tetapi juga memberikan pendidikan politik bagi rakyat/anggota. Contoh: partai politik di Indonesia (1950 – 1960an), seperti PNI, Masyumi, PKI, dan lain-lain.

4. Partai Diktatorial

Merupakan suatu tipe partai massa tetapi memiliki ideologi yang lebih kaku dan radikal. Kontrol terhadap anggota dan rekrutmen anggota sangat ketat (selektif), karena dituntut kesetiaan dan komitmen terhadap ideologi. Contoh: PKI dan umumnya partai komunis.

5. Partai *Catch-all*

Merupakan gabungan partai kader dan partai massa. Istilah “*catch-all*” pertama kali dikemukakan oleh Otto Kirchheimer untuk memberikan tipologi pada kecenderungan partai politik di Eropa Barat pasca Perang Dunia ke-II. *Catch-all* artinya adalah menampung kelompok-kelompok sosial sebanyak mungkin untuk dijadikan anggotanya. Tujuan utama partai ini adalah memenangkan pemilihan umum dengan menawarkan program dan keuntungan bagi anggotanya sebagai ganti ideologi yang kaku. Aktivitas partai ini erat kaitannya dengan kelompok kepentingan dan kelompok penekan.

Contoh: Golkar di Indonesia (1971 – 1998).

Partai politik berbeda dengan kelompok kepentingan (*interest group*) dan kelompok penekan (*pressure group*). Partai dibentuk untuk mempengaruhi jalannya pemerintahan dengan mengajukan calon-calon untuk jabatan politik, sementara kelompok kepentingan dan kelompok penekan lebih memilih cara persuasu, lobi, dan propaganda dalam usaha mempengaruhi pemerintah.²⁰

Dari uraian diatas mengenai jenis-jenis partai politik, PKS termasuk kedalam partai kader

²⁰ <http://id.m.wikipedia.org/> / diakses tanggal 3 april 2012 (katagori partai politi)

4. Kesadaran Politik

Sementara itu Paulo Freire mendefinisikan kesadaran sebagai berikut: yang dimaksud kesadaran adalah pandangan hidup masyarakat terhadap diri mereka sendiri.

Dalam Kamus Ilmiah Populer Internasional, sadar artinya ingat akan dirinya, merasa dan insyaf akan dirinya. Kesadaran artinya sebuah kondisi seseorang, dimana dia tahu apa yang difikirkan, dirasakan dan dilakukan. Jika kita kaitkan dengan ilmu politik, maka kesadaran di sini mempunyai makna: mengerti dengan tindakan yang dilakukan dan yang seharusnya dilakukan sebagai warga negara.

Kesadaran politik dibagi dalam dua bagian, yaitu :

- a) Kesadaran seseorang untuk ikut berproses dalam pendidikan politik.
- b) Kesadaran seseorang untuk ikut berpartisipasi aktif di dalam politik khususnya melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Paulo Freire mengemukakan bahwa kesadaran dibagi 3 macam, yaitu:

- a) Kesadarna Magis

Kesadaran magis adalah suatu kesadaran yang tidak mampu mengetahui kaitan antara satu faktor dengan faktor lainnya. Misalnya saja masyarakat miskin tidak mampu melihat kaitan kemiskinan mereka dengan sistem politik dan kebudayaan.

Kesadaran magis lebih melihat faktor di luar manusia (natural maupun supranatural) sebagai penyebab dari ketakberdayaan.

b) Kesadaran Naif

Kesadaran naif adalah keadaan yang dikategorikan dalam keadaan lebih melihat aspek manusia menjadikan penyebab masalah masyarakat. Dalam kesadaran ini, masalah etika, kreatifitas, dianggap sebagai penentu perubahan sosial. Jadi dalam menganalisis mengapa suatu masyarakat miskin, bagi mereka disebabkan karena salah masyarakat sendiri yakni merasa malas, tidak memiliki kewiraswastaan atau tidak memiliki budaya membangun dan seterusnya.

c) Kesadaran Kritis

Kesadaran kritis lebih melihat aspek sistem dan struktur sebagai sumber masalah. Pendekatan struktural menghindari “blaming the viedms” dan lebih menganalisis untuk secara kritis menyadari struktur dan sistem sosial, politik, ekonomi dan budaya dan akibatnya pada keadaan masyarakat.²¹

Dari uraian di atas, maka dapat penyusun simpulkan bahwa pengertian kesadaran adalah kondisi tahu akan diri dan lingkungan sekitarnya, tahu akan tindakan yang dilakukan dengan segala akibatnya. Kesadaran bermula dari adanya pemahaman akan suatu hal, kemudian

²¹ Luqman Hakim, 1992, *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*, Tiara Wacana, Yogyakarta, hal 127.

adanya keinginan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal tersebut. Kesadaran politik adalah kondisi ingat dan tahu dalam proses politik baik pendidikan politik maupun peran sertanya secara aktif dalam politik terutama pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara.

E. Definisi Konsepsional

a. Partai islam

Partai islam adalah partai yang berdiri dari didasari atas akidah islam, yang mengadopsi berdasarkan hukum, dan solusi yang islami, yang metode perjuangannya adalah metode perjuangan Rasulullah SAW. partai islam adalah sebuah organisasi permanen yang beranggotakan orang-orang islam yang bertujuan melakukan aktifitas politik sesuai dengan ketentuan syariat islam.

b. Efektivitas

Efektivitas adalah tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang dan tanggung jawab yang dilaksanakan oleh seseorang atau organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan atau direncanakan.

c. Partai Politik

Partai politik merupakan organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada persoalan kekuasaan pemerintah dan bersaing guna memperoleh dukungan rakyat untuk menempatkan kantong-kantong kekuasaan politik. Juga sebagai perantara utama yang

menghubungkan kekuasaan dan ideologi-ideologi yang ada dalam masyarakat.

d. Fungsi Sosialisasi Politik

Fungsi sosialisasi politik, proses pendalaman nilai-nilai politik kepada warga Negara yang berlangsung terus menerus sepanjang hidup. Adapun agen sosialisasi politik adalah sekolah, keluarga, tempat berkerja, kejadian politik dan media massa.

F. Definisi Operasional

Kesadaran politik masyarakat adalah adanya pengetahuan politik tentang hak dan kewajiban politik sebagai warga negara dan adanya keinginan untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik. Kesadaran politik dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain:

- a. Adanya pemahaman politik secara benar
- b. Adanya motivasi politik dalam masyarakat
- c. Adanya partisipasi politik dalam masyarakat secara aktif dan bertanggung jawab.

Pelayanan yang diberikan oleh Partai Keadilan Sejahtera meliputi berbagai bidang, antara lain sebagai berikut :

- 1) Bidang Kesehatan
- 2) Bidang Ekonomi
- 3) Bidang Politik
- 4) Bidang Publik
- 5) Bidang Keagamaan

Adapun efektifikasi partai politik dalam membangun kesadaran politik masyarakat dilihat dari aspek sebagai berikut:

- a. Produktivitas partai politik dalam melaksanakan fungsinya
 - 1) Tingkat pelayanan yang diberikan oleh partai politik terhadap masyarakat.
 - 2) Tingkat kemudahan yang diberikan oleh partai politik sehubungan dengan pemanfaatan program-programnya.
 - 3) Tingkat pemanfaatan pelayanan yang membawa perubahan perilaku politik masyarakat.
 - 4) Tingkat keseimbangan usaha yang dilakukan dengan hasil yang dicapai.
- b. Fleksibilitas partai politik
 - 1) Tingkat kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi di dalam partai.
 - 2) Tingkat kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi di luar partai.
- c. Ada tidaknya hambatan dan konflik dalam partai politik dapat diukur dari:
 - 1) Tingkat ada tidaknya hambatan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.
 - 2) Tingkat ada tidaknya konflik dalam tubuh partai.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan metode analisa kualitatif. Bentuk penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode yang tertuju pada pemecahan masalah pada masa sekarang. Menurut Bogdan dan Taylor, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pada prakteknya tidak terbatas pada pengumpulan dan penyusunan data saja tetapi juga menganalisis dan menginterpretasikan data tersebut. Dengan menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif peneliti mencoba untuk memaparkan permasalahan yang diteliti dengan menggunakan teori-teori yang ada untuk menganalisa permasalahan di lapangan agar dapat menjelaskan fenomena-fenomena yang menjadi fokus kajian dalam penelitian.²²

2. Unit Analisa

Unit analisa dari penelitian Efektifitas Fungsi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Membangun Kesadaran Politik Masyarakat adalah pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sleman dan simpatisan atau kadernya yang terdiri dari :

²² Dian rahmawati,2008, Diktat Kuliah Metode Penelitian Kualitatif, UMY

- a. Pimpinan teras PKS meliputi Ketua DPD, sekretaris, bendahara, kepala bidang, anggota DPRD dan juga diambil dari kader-kader dan pengurus harian DPD PKS.
- b. Simpatisan atau massa PKS meliputi buruh, pedagang, pengusaha, PNS dan mahasiswa.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik, yaitu: teknik interview, observasi dan dokumentasi. Melalui beberapa teknik tersebut diharapkan dapat diperoleh data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil interview, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari monografi atau laporan dari pihak lain.

Secara rinci masing-masing teknik seperti tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Interview

Interview adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan secara lisan melalui percakapan langsung atau berhadapan langsung dengan orang yang dapat memberikan informasi atau keterangan kepada peneliti. Dalam kaitan ini interview dilakukan terhadap pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sleman dan simpatisan atau kader.

b. Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data, dimana penyelidik pengamatan terhadap gejala subyek yang diselidiki, baik pengamatan dalam situasi buatan atau khusus diadakan.²³ Metode yang dilakukan adalah dengan cara pengamatan dan mencatat dengan sistematis terhadap yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dari subyek-subyek yang diteliti. Dalam kaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis maka data yang dipakai dalam metode observasi ini adalah data-data dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera (DPD PKS) Sleman.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat yang berhubungan dengan penelitian atau koran, majalah dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang ada dalam penelitian. Dokumentasi ini diambil dari arsip-arsip mengenai Partai Keadilan Sejahtera yang ada di kantor DPD PKS Sleman dan juga koran/majalah yang memuat tentang partai tersebut.

4. Tehnik Analisa Data

Winarno Surachmad mengatakan bahwa teknik analisa data dalam penelitian kualitatif meliputi: pengumpulan data, penilaian data, penafsiran data, dan penyimpulan data. Berangkat dari pemikiran tersebut di atas

²³ Winarno Surachmad, 1990, Pengantar Penelitian Ilmiah, Tarsito, Bandung, hlm 162

maka teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi empat tahapan.²⁴

- a. Pengumpulan data
- b. Penilaian data
- c. Interpretasi data
- d. Penarikan kesimpulan dan generalisasi

Pertama, seperti yang telah diuraikan di muka pengumpulan data dilakukan dengan teknik interviw, observasi dan dokumentasi. Ketiga teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder.

Kedua, problem utama menyangkut dalam penelitian kualitatif pada umumnya menyangkut validitas data primer dan data sekunder, maka untuk tahap penelitain data dilakukan kontrol atas data yang telah tersedia. Dalam melakukan kontrol, penyusun menggunakan cara bahwa data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder saling mencocokkan. Di samping itu juga disesuaikan dengan kenyataan yang ada “di lapangan”, kontrol ini diharapkan akan diperoleh data yang relevan dengan penilaian yang dilakukan selama cara itu ditunjukkan pula untuk memenuhi kriteria validitas maupun obyektivitas.

Ketiga, langkah interpretasi data ini pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan langkah kedua (penilaian data) tetapi satu tingkat di atasnya. Langkah ketiga ini membutuhkan kecermatan yang harus dibekali seperangkat konsepsional yang telah disusun.

²⁴ Winarno Surachmad, 1990, Pengantar Penelitian Ilmiah, Tarsito, Bandung, hlm 137

Keempat, dilakukan dengan penarikan kesimpulan yang menerangkan secara ringkas apa yang sudah dibahas sebelumnya sehingga menimbulkan kejelasan akan apa yang menjadi masalah dan pemecahan serta jawaban atas permasalahan yang diteliti dan pengumpulan penilaian dan interpretasi data yaitu lebih menekankan pada penampilan data apa adanya sesuai dengan realitas di lapangan serta penarikan generalisasi dan saran-saran.